



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SOFI'NGI**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **84110**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 540.000.000**

1. Tanah Seluas 220 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/98 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/36 m2 di DEMAK, WARISAN Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 160.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYLA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 17.425.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 12.416.981****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 729.841.981****III. HUTANG****Rp. 46.593.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 683.248.981**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak



-
- dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Desember 2018**.
 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.